

Laporan Keuangan Pemerintahan

Dasar Hukum

- ▶ UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
- ▶ UU no 1 tahun 2004 perbendaharaan negara
- ▶ UU no 15 tahun 2004 tentang PPTKN
- ▶ UU no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- ▶ PP no 24 tahun 2005 tentang SAP

Pelaporan Keuangan Pemerintah

- ▶ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 1 – Penyampaian Laporan Keuangan
- ▶ PSAP 2 – Laporan Realisasi Anggaran
- ▶ PSAP 3 – Laporan Arus Kas
- ▶ PSAP 4 – Catatan atas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi

- penerapan prinsip prinsip akuntansi oleh entitas pelaporan yang diatur oleh Standar Akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian.
- merupakan pilihan-pilihan sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan keluaran menurut Standar Akuntansi.

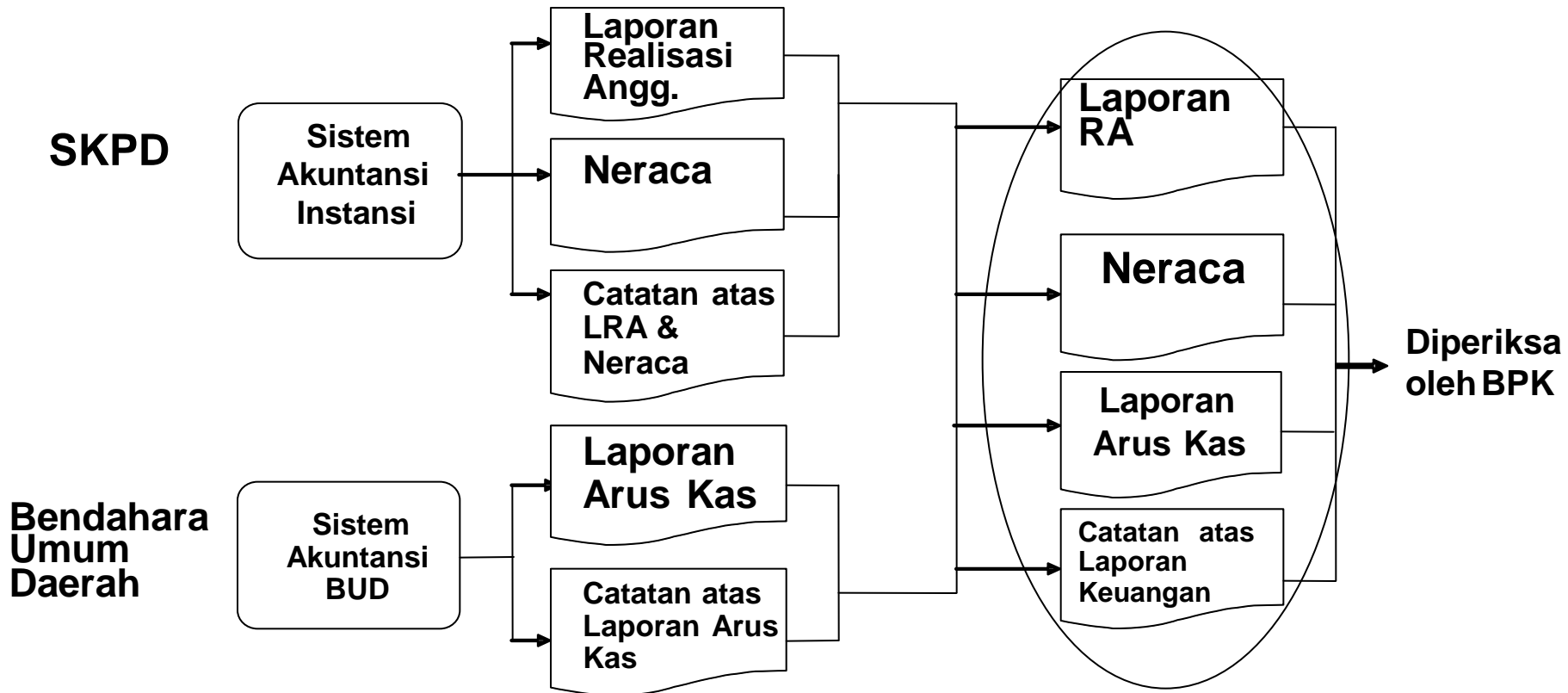
Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Penyajian Laporan Keuangan
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan
5. Akuntansi Persediaan
6. Akuntansi Aset Tetap
7. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
8. Akuntansi Investasi
9. Akuntansi Kewajiban
10. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
11. Laporan Keuangan Konsolidasian

Hubungan STANDAR dengan SISTEM

- Standar menjadi acuan dalam penyusunan Sistem. Keluaran Sistem harus sesuai dengan ketentuan dalam Standar.
- SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedang Sistem merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Standar.

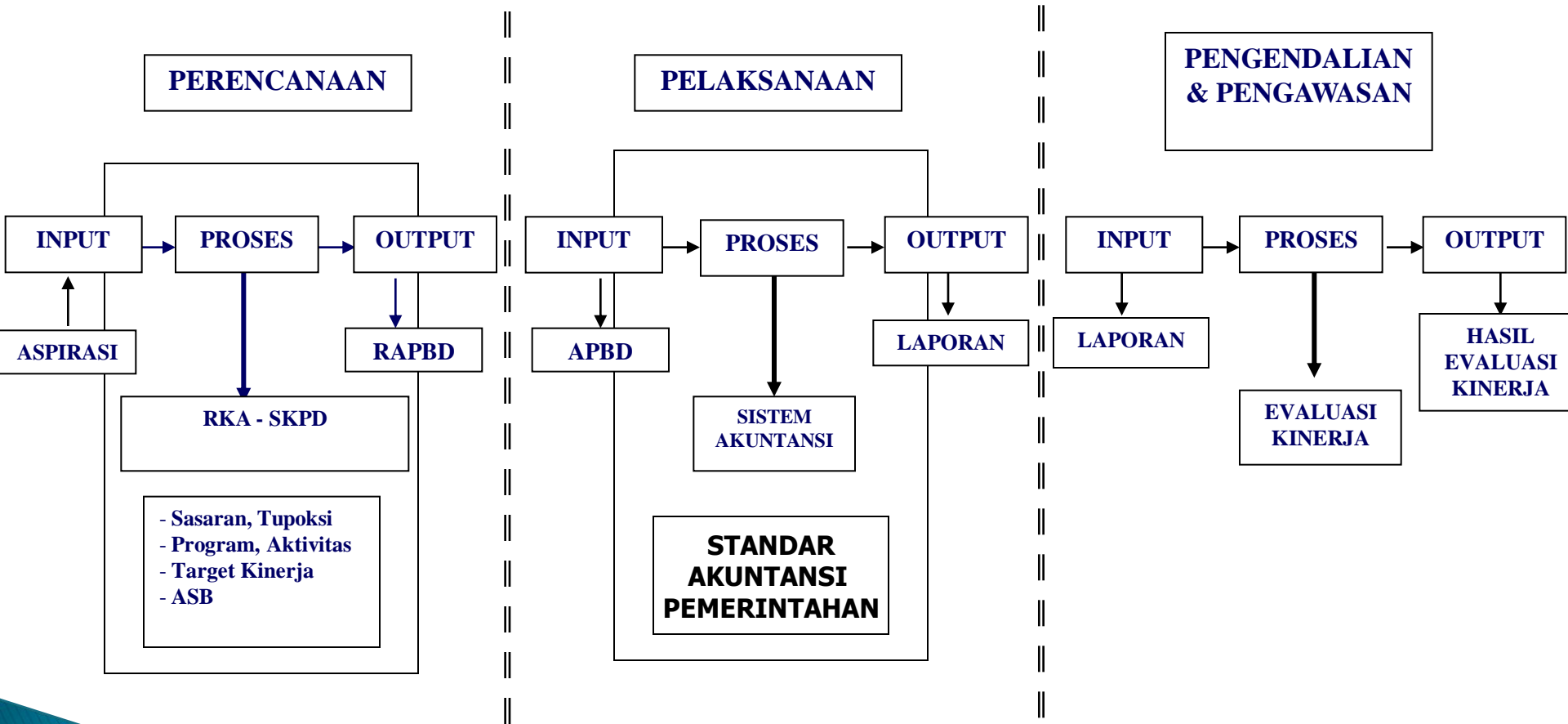
ALUR PELAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH



ISI POKOK PSAP

- OBJECTIVE (TUJUAN)
- DEFINITION (DEFINISI)
- RECOGNITION (PENGAKUAN)
- MEASUREMENT (PENGUKURAN)
- REPORTING (PELAPORAN)
- DISCLOSURE (PENGUNGKAPAN)

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN PSAP NO. 01

- Untuk mengatur **penyajian Laporan Keuangan** untuk **tujuan umum** (*general purposes financial statement*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Ruang Lingkup PSAP NO. 01

- Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan **basis kas** untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta **basis akrual** untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana

Definisi

- **Apropriasi**
- **Entitas Akuntansi**
- **Entitas Pelaporan**
- **Kebijakan Akuntansi**
- **Laporan Keuangan Konsolidasian**
- **Laporan Keuangan Interim**

LAPORAN KEUANGAN

- Tujuan Umum dan Tujuan Khusus
- Laporan keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif
- Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan
- Komponen-komponen Laporan Keuangan

Struktur dan Isi Laporan Keuangan

- Identifikasi Laporan Keuangan
 - Periode Pelaporan
 - Tepat Waktu
 - Laporan Realisasi Anggaran
- Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran

Struktur dan Isi Laporan Keuangan

Neraca

Unsur-unsur Neraca:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Kewajiban jangka pendek;
- h. Kewajiban jangka panjang;
- i. Ekuitas dana.

Struktur dan Isi Laporan Keuangan

- Laporan Arus Kas diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
- Laporan Kinerja Keuangan:
 - a. Pendapatan dari kegiatan operasional;
 - b. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi;
 - c. Surplus dan defisit.

Struktur dan Isi Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan

Unsur-unsur Catatan atas Laporan Keuangan:

- a. Informasi kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- c. Informasi ttg dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan PSAP;
- e. Pengungkapan informasi aset, kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- f. Informasi tambahan;
- g. Daftar dan skedul.

Masa Efektif SAP

- Berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2005

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TUJUAN PSAP NO. 02

- menetapkan dasar2 penyajian LRA untuk Pemda dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan
- memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundangan-undangan.

Ruang Lingkup PSAP NO. 02

- Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi **berbasis kas**.
- Pernyataan ini tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
- Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

- Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
- Mengevaluasi keputusan alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan.
- Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah.

Definisi

- **Azas Bruto**
- **Basis Kas**
- **Pembiayaan**

Struktur Laporan Realisasi Anggaran

- Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- Periode Pelaporan
- Tepat Waktu

Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/defisit;
- e. Penerimaan Pembiayaan;
- f. Pengeluaran Pembiayaan;
- g. Pembiayaan neto; dan
- h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
(SILPA/SIKPA)

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

NO.	URAIAN	(Dalam Rupiah)			
		Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/ d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/ d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/ d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/ d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 s/ d 26)	xxxxx	xxxxx	xx	xxxxx

27									
28									LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
29									Pendapatan Hibah
30									Pendapatan Dana Darurat
31									Pendapatan Lainnya
32									Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/ d 31)
33									JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)
34									
35									<u>BELANJA</u>
36									BELANJA OPERASI
37									Belanja Pegawai
38									Belanja Barang
39									Bunga
40									Subsidi
41									Hibah
42									Bantuan Sosial
43									Jumlah Belanja Operasi (37 s/ d 42)
44									
45									BELANJA MODAL
46									Belanja Tanah
47									Belanja Peralatan dan Mesin
48									Belanja Gedung dan Bangunan
49									Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
50									Belanja Aset Tetap Lainnya
51									Belanja Aset Lainnya
52									Jumlah Belanja Modal (46 s/ d 51)

53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									

84									
85	PENGELUARAN PEMBIAYAAN								
86		Pembentukan Dana Cadangan			XXX	XXX	XX	XXX	
87		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			XXX	XXX	XX	XXX	
88		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			XXX	XXX	XX	XXX	
89		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX	
90		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			XXX	XXX	XX	XXX	
91		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			XXX	XXX	XX	XXX	
92		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi			XXX	XXX	XX	XXX	
93		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX	
88		Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara			XXX	XXX	XX	XXX	
89		Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			XXX	XXX	XX	XXX	
90		Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			XXX	XXX	XX	XXX	
91		Jumlah Pengeluaran (86 s/ d 90)			XXX	XXX	XX	XXX	
92		PEMBIAYAAN NETO (83 - 91)			XXXX	XXXX	XX	XXXX	
93									
94		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (66 + 92)			XXXX	XXXX	XX	XXXX	

Akuntansi Pendapatan

1. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
3. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dan bagi hasil.
4. Akuntansi pendapatan dilaksanakan dengan azas bruto.

Akuntansi Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
4. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil.
5. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Contoh Klasifikasi Belanja menurut ekonomi (Jenis Belanja)

- Belanja Operasi:
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Bunga
 - Subsidi
 - Hibah
 - Bantuan Sosial
- Belanja Modal:
 - Belanja Aset Tetap
 - Belanja Aset Lainnya
- Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Contoh Klasifikasi Belanja menurut fungsi

Belanja:

- Pelayanan Umum
- Pertahanan
- Ketertiban dan Keamanan
- Ekonomi
- Perlindungan Lingkungan Hidup
- Perumahan dan Pemukiman
- Kesehatan
- Pariwisata dan Budaya
- Agama
- Pendidikan
- Perlindungan Sosial

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 03

LAPORAN ARUS KAS

TUJUAN PSAP NO. 03

- Mengatur **penyajian** laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan **arus kas berdasarkan** aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Ruang Lingkup PSAP NO. 03

- Laporan Arus Kas sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.

Manfaat Informasi Arus Kas

- Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan ke luar selama periode pelaporan.
- Bahan evaluasi perubahan kekayaan bersih/ ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

Definisi

- **Arus Kas**
- **Aktivitas operasi**
- **Aktivitas investasi aset non keuangan**
- **Aktivitas pembiayaan**
- **Aktivitas non anggaran**

Entitas Pelaporan Arus Kas

- Entitas pelaporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Unit organisasi fungsi perbendaharaan adalah BUN/BUD.

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
 Metode Langsung

No.	Uraian	(Dalam Rupiah)	
		20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/ d 17)	XXX	XXX
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/ d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	XXX	XXX

32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan			
33	Arus Masuk Kas			
34		Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35		Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36		Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37		Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38		Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39		Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40		Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas			
42		Belanja Tanah	XXX	XXX
43		Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44		Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45		Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46		Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47		Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48		Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	XXX	XXX

50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
51	Arus Masuk Kas			
52		Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54		Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55		Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56		Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57		Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58		Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59		Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63		Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	XXX	XXX
64	Arus Keluar Kas			
65		Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66		Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72		Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73		Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74		Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75		Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76		Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	XXX	XXX
77		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	XXX	XXX

78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran				
79	Arus Masuk Kas				
80		Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		XXX	XXX
81		Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)		XXX	XXX
82	Arus Keluar Kas				
83		Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		XXX	XXX
84		Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)		XXX	XXX
85		Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)		XXX	XXX
86		Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)		XXX	XXX
87		Saldo Awal Kas di BUD		XXX	XXX
88		Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)		XXX	XXX
89		Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX	XXX
90		Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		XXX	XXX
91		Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)		XXX	XXX

Penyajian Laporan Arus Kas: Aktivitas Operasi

Arus masuk kas aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. Penerimaan Hibah;
- d. Penerimaan Bagian Laba PN/PD dan investasi lainnya;
- e. Transfer masuk

Penyajian Laporan Arus Kas: Aktivitas Operasi

- Arus keluar kas aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Bunga;
 - d. Subsidi;
 - e. Hibah;
 - f. Bantuan Sosial;
 - g. Belanja lain-lain/Tak terduga; dan
 - h. Transfer ke luar

Penyajian Laporan Arus Kas: Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

- Arus masuk kas aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
 - a. Penjualan Aset Tetap;
 - b. Penjualan Aset Lainnya.
- Arus keluar kas aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
 - a. Perolehan Aset Tetap;
 - b. Perolehan Aset Lainnya;

Penyajian Laporan Arus Kas: Aktivitas Pembiayaan

- Arus masuk kas aktivitas pembiayaan antara lain:
 - a. Penerimaan Pinjaman;
 - b. Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
 - c. Penerimaan dari Divestasi;
 - d. Penerimaan Kembali Pinjaman;
 - e. Pencairan Dana Cadangan.

Penyajian Laporan Arus Kas: Aktivitas Pembiayaan

- Arus keluar kas aktivitas pembiayaan antara lain:
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah;
 - b. Pembayaran Pokok Pinjaman;
 - c. Pemberian Pinjaman Jangka Panjang;
 - d. Pembentukan Dana Cadangan

Penyajian Laporan Arus Kas: Aktivitas non anggaran

- Arus masuk kas aktivitas non anggaran terdiri dari:
 - a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); dan
 - b. Kiriman uang masuk.
- Arus ke luar kas aktivitas non anggaran terdiri dari:
 - a. Pengeluaran PFK; dan
 - b. Kiriman uang ke luar.

Perolehan dan Pelepasan PN/PD dan Unit Operasi lainnya

- Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan PN/PD dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.
- Hal-hal yang diungkapkan:
 - a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
 - b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas atau setara kas;
 - c. Jumlah kas dan setara kas pada PN/PD dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh PN/PD dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
NO. 04**

**Catatan atas Laporan
Keuangan**

TUJUAN PSAP NO. 04

- Mengatur **penyajian** dan **pengungkapan** yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ruang Lingkup PSAP NO. 04

- Diterapkan pada Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas pelaporan;
- Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.

Ketentuan Umum

- Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- Dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Struktur dan Isi

- Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Struktur dan Isi

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi yang antara lain:

- a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih;
- d. Pengungkapan informasi yang diharuskan PSAP;
- e. Pengungkapan informasi aset, kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- f. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Selama Tahun Pelaporan

- Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi Anggaran harus mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode berjalan.
- Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan pertaturan perUU-an yang berlaku.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

- Asumsi Dasar (Kemandirian, Kestinambungan, dan Keterukuran)
- Pengguna Laporan Keuangan
- Kebijakan Akuntansi
Pertimbangan kebijakan akuntansi:
 - a. Pertimbangan Sehat
 - b. Substansi Mengungguli Bentuk Formal
 - c. Materialitas.

Kebijakan Akuntansi pada CALK

1. Entitas pelaporan;
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
3. Basis pengukuran yang digunakan;
4. Sampai sejauh mana kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi PSAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan;
5. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Susunan Catatan Atas Laporan Keuangan

- a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD;
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan;
- c. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - Entitas pelaporan
 - Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - Basis pengukuran yang digunakan;
 - Kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan PSAP oleh suatu entitas pelaporan;
 - Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Susunan Catatan atas Laporan Keuangan

- d. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;
- e. Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.